

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Zulsyid, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa anak memiliki hak diantaranya hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang layak karena lingkungan dan pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter anak.

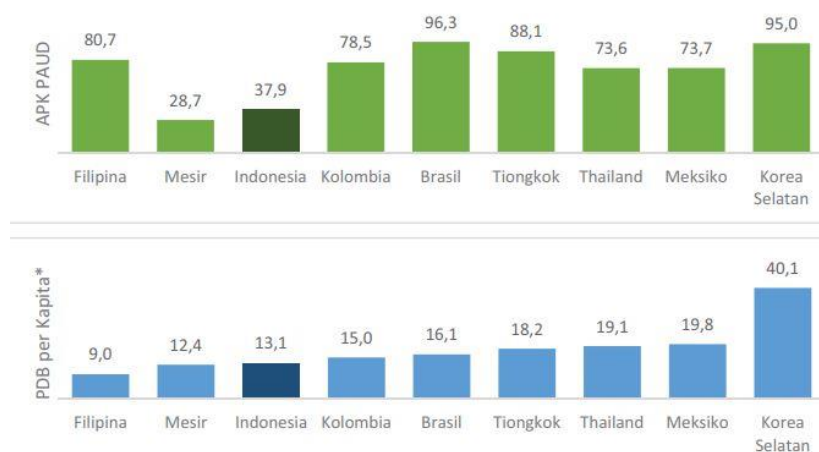
Dalam hal pendidikan, anak-anak merupakan investasi penting bagi bangsa karena mereka akan menjadi sumber daya manusia yang akan menggerakkan roda pembangunan. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam rangka menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, diperlukan pengembangan pendidikan yang baik dan terus menerus. Pendidikan Anak Usia Dini menjadi salah satu bagian dari kebutuhan masyarakat, menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistematis. Pada pasal 28 ayat 5 juga disebutkan bahwa Pendidikan Anak usia Dini pada jalur informal

adalah berbentuk Pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak dari sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani (Sugian, Fahrudin, & Witono, 2021). Tujuan utama PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh sehingga hak anak dapat terpenuhi.

Dalam pelaksanaan PAUD di Indonesia tergolong masih rendah dan hanya menjangkau sebagian kecil dari masyarakat. Jika menyandingkan angka partisipasi PAUD dengan pendapatan perkapita sejumlah negara, angka partisipasi PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain.

Gambar 1. 1 APK PAUD



Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat PAUD, 2022

Berdasarkan gambar diatas, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah berada dibawah 40%, jika dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya mencapai 70%. Penyebab

yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi PAUD di Indonesia adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (*Golden Age*) masih rendah, terutama orang tua dan keluarga yang beranggapan bahwa masa sekolah adalah berawal belajar sekolah formal pada Sekolah Dasar (SD), sehingga lima tahun pertama berlalu begitu saja di rumah tanpa stimulasi yang optimal dari orang tua yang menyebabkan angka partisipasi anak yang mengikuti PAUD menurun pada tahun 2021.

Tabel 1. 1 APK PAUD berdasarkan Provinsi di Indonesia

<b>Provinsi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aceh	29.21	32.70
Sumatera Utara	24.51	22.53
Sumatera Barat	29.87	27.53
Riau	25.61	23.64
Jambi	32.91	30.56
Sumatera Selatan	26.24	24.24
Bengkulu	28.44	26.53
Lampung	35.13	32.49
Kep. Bangka Belitung	33.86	31.73
Kep. Riau	30.25	27.91
Dki Jakarta	39.44	36.68
<b>Jawa Barat</b>	<b>35.46</b>	<b>33.04</b>
Jawa Tengah	50.24	47.33
Di Yogyakarta	67.46	64.76
Jawa Timur	56.24	53.33
Banten	30.44	27.58
Bali	31.81	29.67
Nusa Tenggara Barat	42.46	41.01
Nusa Tenggara Timur	32.72	32.59
Kalimantan Barat	22.69	21.66

Kalimantan Tengah	37.23	35.83
Kalimantan Selatan	45.71	43.79
Kalimantan Timur	28.67	26.03
Kalimantan Utara	34.89	32.48
Sulawesi Utara	32.85	30.42
Sulawesi Tengah	39.40	37.09
Sulawesi Selatan	31.79	29.41
Sulawesi Tenggara	34.62	32.70
Gorontalo	48.47	50.18
Sulawesi Barat	42.35	43.38
Maluku	34.17	31.87
Maluku Utara	37.88	38.76
Papua Barat	26.45	24.65
Papua	11.47	10.51
<b>Indonesia</b>	<b>37.52</b>	<b>35.59</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2022

Data tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengindikasikan bahwa terjadi penurunan angka partisipasi anak dalam rentang usia yang sesuai yang mengikuti program PAUD, dari 37,52% pada tahun 2020 menjadi 35,59% pada tahun 2021. Total rata-rata keseluruhan provinsi di Indonesia pada tahun 2021 hanya 35,59% APK PAUD, kenyataan ini jauh dibawah target RPJMN 2015-2019 yang sebesar 77%. Artinya, masih terdapat sebagian besar anak usia dini di Indonesia yang belum terdaftar atau tidak mengikuti program PAUD.

Periode anak usia dini atau yang dikenal sebagai “*Golden Age*” adalah masa perkembangan anak dari usia 0 hingga 5 tahun. Masa usia dini merupakan tahun-tahun berharga dalam kehidupan seorang anak karena perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak berkembang pesat selama periode ini (Tanu, 2017). Banyak hal istimewa yang terjadi dalam rentang masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

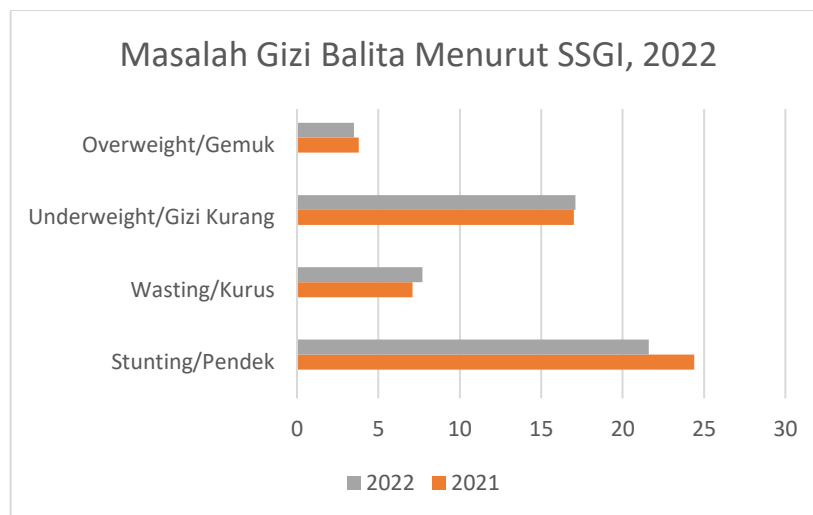
sehingga masa tersebut diistilahkan dengan *The Golden Age*, karena pada periode ini otak dan seluruh organ akan berkembang sangat pesat dan apabila buah hati kekurangan gizi pada 1.000 HPK sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun, maka tidak bisa digantikan dimasa kehidupan yang akan datang, sehingga orang tua harus memberikan perhatian dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ada agar pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dilalui secara optimal (Apriani, 2022). Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa usia dini akan menentukan bagaimana anak tersebut tumbuh dan berkembang dimasa selanjutnya, karena masa usia dini merupakan titik awal yang dapat menentukan masa depan anak, maka dari itu pada masa tersebut seyogyanya anak dapat memperoleh pelayanan maksimal, berkualitas dan terpadu secara holistic integrative untuk dapat memenuhi kebutuhan esensial anak (Oktaviani & Dimiyati, 2021).

Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 277,8 juta jiwa atau 3,45% dari total populasi dunia dengan berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia (Worldometers, 2023). Dari sepertiga populasi penduduk di Indonesia adalah anak-anak, terdapat sekitar 82,96 juta anak yang menjadikan Indonesia menduduki posisi ketujuh dengan populasi anak terbesar di dunia pada tahun 2023 ini (Rizaty, 2023). Badan Pusat Statistika (BPS) pun mencatat jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 30,73 juta jiwa pada tahun 2022, angka tersebut setara dengan 11,21% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Dengan komposisi tersebut akan menjadi modal dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Namun pada hasil Susenas menunjukkan pada tahun 2021 persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak sebesar 3,69%, adapun 33,43% anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan dan separuhnya mengalami sakit (16,09%).

Masalah gizi yang dialami oleh baduta dan balita di Indonesia dapat menyebabkan dampak serius pada pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah stunting atau keterlambatan pertumbuhan fisik di mana kondisi anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari usia seharusnya, kemudian mengalami kelemahan system kekebalan tubuh karena anak mengalami kekurangan gizi sehingga memiliki system kekebalan tubuh yang lemah, keterlambatan perkembangan mental dan dapat meningkatkan risiko kematian. Adapun masalah gizi yang dialami baduta dan balita menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 antara lain:

Gambar 1. 2 Masalah Gizi yang dialami Balita Menurut SSGI Tahun 2022



Sumber: (Annur, 2023)

Berdasarkan data diatas menunjukkan sebanyak 21,6% Balita *stunted*/pendek yang mana permasalahan ini merupakan masalah gizi terbesar bagi anak usia dini. Angka tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Ada 17,1% Balita mengalami kekurangan gizi, terdapat 7,7% Balita *wasted*/kurus, ada pula 3,5% justru *overweight*/kelebihan berat badan. Data tersebut mempresentasikan kondisi gizi pada anak usia dini di Indonesia perlu diperbaiki.

Sejak beberapa dekade yang lalu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya terhadap isu anak dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian, pemerintah menyusun regulasi turunan terkait anak usia dini melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Berangkat dari Perpres Nomor 60 Tahun 2013, pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2020-2024. Kerangka penyusunan indikator RAN PAUD HI merujuk pada tujuan khusus PAUD HI yang memuat aspek kesehatan dan gizi, pendidikan, pengasuhan, kesejahteraan dan perlindungan.

Layanan kebijakan PAUD HI diharap menjadikan anak lebih siap untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar akademik di sekolah melainkan belajar berkehidupan sosial, emosional, moral dan lain-lain yang berlaku pada lingkungan sosial. Untuk menciptakan layanan Pendidikan yang berkualitas, setiap satuan PAUD harus berupaya untuk melakukan peningkatan mutu dan kualitas dengan tidak berorientasi pada aspek pendidikan saja, akan tetapi juga pada aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya yakni aspek kognitif, bahasa, motorik fisik, seni dan nilai moral (Ambriani & Surayana, 2022). Oleh karena itu, adanya PAUD HI sangatlah diperlukan guna memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan terpadu, melalui pelayanan sistematis dan terencana, dapat mencakup lingkungan mikro, meso, exo dan makro (Oktaviani & Dimiyati, 2021).

Sejak mulai direalisikannya kebijakan PAUD HI di tahun 2013 hingga tahun 2021 kemarin, data menunjukkan bahwa masih banyak Lembaga PAUD yang belum menerapkan PAUD HI secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi PAUD HI di Indonesia

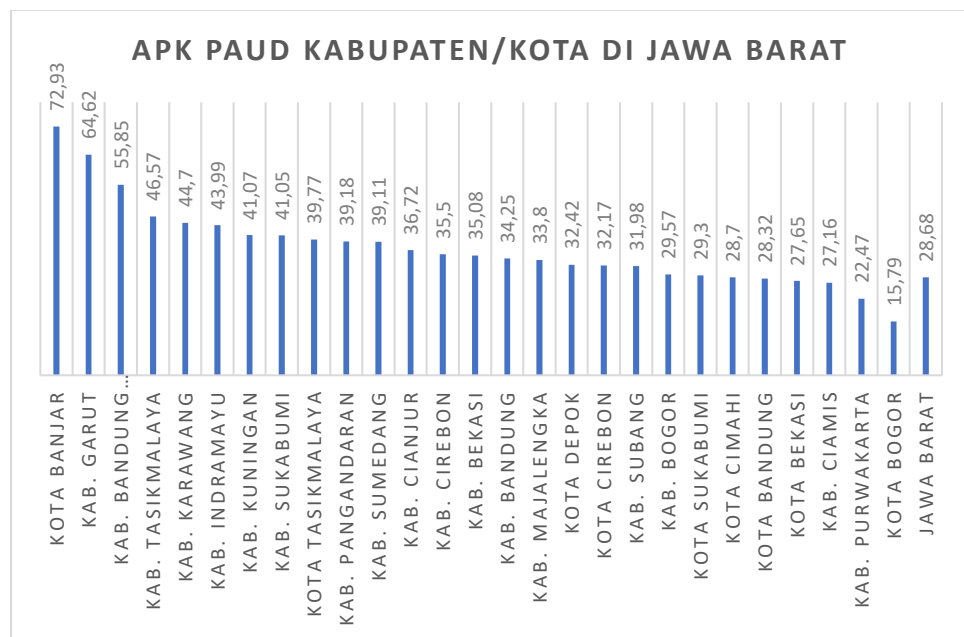
2021		Target Akhir Renstra 2024	Capaian Realisasi Terhadap Target Renstra 2024
Target	Realisasi		
35%	27,45%	75%	36,60%

Sumber: Lakip Direktorat PAUD Kemendikbudristek, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa angka realisasi PAUD HI pada Lembaga PAUD masih dibawah target yang sebesar 35%. Terkait dengan APK PAUD yang masih rendah dan penyelenggaraan PAUD HI yang belum menyeluruh juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data provinsi yang disajikan sebelumnya, pada tahun 2021 APK PAUD di Provinsi Jawa Barat tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Menurut data tersebut, APK PAUD di Jawa Barat sebesar 28,68% sedangkan rata-rata nasional sebesar 35,59%.

Dibawah ini adalah grafik APK PAUD per Kabupaten/Kota di Jawa Barat :

Gambar 1. 3 APK PAUD Per Kabupaten/Kota di Jawa Barat



Sumber: Data Kemendikbud, 2022

Data yang tersaji menunjukkan bahwa Kota Banjar memiliki APK PAUD dengan persentase tertinggi sebesar 72,93%. Sementara itu, wilayah dengan APK PAUD terendah adalah Kota Bogor dengan persentase sebesar 15,79%. Jika dibandingkan kedua wilayah tersebut, adanya perbandingan angka yang cukup jauh yakni sebesar 57,14%. Hal tersebut menunjukkan



kurangnya komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Berikut ini persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD di Kota Bogor berdasarkan Kecamatan

Tabel 1. 3 APK dan APM PAUD di Kota Bogor

No	Kecamatan	APK	APM
1	Bogor Selatan	42,31%	32,93%
2	Bogor Utara	42,67%	33,81%
3	Bogor Timur	48,75%	39,85%
4	Bogor Tengah	54,66%	43,34%
5	Bogor Barat	40,48%	34,86%
6	Tanah Sareal	71,37%	40,02%
<b>Total</b>		<b>50,20%</b>	<b>36,74%</b>

Sumber : Data APK APM Kota Bogor, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa APK pada tingkat PAUD di Kota Bogor pada tahun 2021 masih belum mencapai 100% bahkan baru setengah anak usia prasekolah yang berpartisipasi dalam program PAUD, target pemerintah Kota Bogor adalah 52% untuk anak usia dini dapat ikut serta dalam kegiatan pra-sekolah. APK PAUD Kota Bogor hanya mencapai 50,1% dengan persentase tertinggi berada pada Kecamatan Tanah Sareal yang mencapai 71,4%. Sementara yang terendah adalah Kecamatan Bogor Barat dengan persentase 40,5%. Selain itu, data tersebut memperlihatkan bahwa si tingkat Kota Bogor capaian APM PAUD hanya sebesar 36,47% dan capaian ini lebih rendah daripada nilai APK PAUD seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 63,26% anak usia 3-6 tahun di Kota Bogor belum bersekolah PAUD.

Program PAUD HI di Kota Bogor dalam pelaksanaannya di tingkat kota yakni oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengembangan

Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Bogor. Layanan PAUD HI di Kota Bogor baru direalisasikan pada tahun 2020 sejak adanya RAN PAUD HI 2020-2024. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Bogor menjadi pihak yang menjalankan kebijakannya, berdasarkan Perwal Nomor 11 Tahun 2022 bahwasanya layanan pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dinas yang membidangi Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan. Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. Pembinaan PAUD
- b. Penyediaan layanan PAUD, Peningkatan kualitas pembelajaran
- c. Penyediaan layanan pendidikan keluarga
- d. Peningkatan kompetensi guru
- e. Pembinaan guru dan Tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas

Semua kecamatan di Kota Bogor tercatat memiliki total satuan PAUD sebanyak 537 unit yang tersebar pada enam wilayah kecamatan. Namun, belum semua satuan PAUD menerapkan layanan PAUD HI. Berikut ini datanya :

Tabel 1. 4 Realisasi PAUD HI di Kota Bogor

No	Kecamatan	Jumlah PAUD	Jumlah PAUD HI
1	Bogor Selatan	83	11
2	Bogor Utara	92	21
3	Bogor Timur	47	9
4	Bogor Tengah	69	16
5	Bogor Barat	111	20
6	Tanah Sareal	135	23
<b>Total</b>		<b>537</b>	<b>100</b>

Sumber: data diolah peneliti dan Buku Profil Anak Kota Bogor 2022

Berdasarkan tabel diatas, semua kecamatan di Kota Bogor telah memiliki PAUD HI di wilayahnya dengan total PAUD HI di Kota Bogor

pada tahun 2021 sebanyak 100 unit. Kecamatan yang memiliki PAUD HI paling banyak adalah Kecamatan Tanah Sereal dengan jumlah sebanyak 23 unit, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah PAUD HI paling sedikit yaitu Kecamatan Bogor Timur dengan jumlah 9 unit. Ketersediaan PAUD HI di Kota Bogor harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk memastikan anak-anak di Kota Bogor mendapatkan layanan anak usia dini yang holistik integratif karena pemerintah Kota Bogor pun menargetkan agar semua Satuan PAUD yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Bogor menyelenggarakan layanan PAUD HI.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD pasal 9, bahwasanya lingkup materi Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya local. Pelaksanaan tema dan sub tema dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan dengan memuat unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

- 1) Nilai agama dan moral, meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain
- 2) Fisik-motorik, meliputi :
  - a. Motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan
  - b. Motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk

- c. Kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.

3) Kognitif, meliputi :

- a. Belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru
- b. Berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat
- c. Berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.

4) Bahasa, terdiri atas :

- a. Memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangkan dan menghargai bacaan
- b. Mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan
- c. Keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita

5) Sosial-emosional, meliputi :

- a. Kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain
- b. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur

- diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama
- c. Perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan.
- 6) Seni, meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama.

Pelaksanaan PAUD HI pada Lembaga PAUD di Kota Bogor yang terjadi saat ini, masih belum merata, lembaga PAUD dominan memberikan pelayanan yang kurang lengkap, baik dari segi fasilitas maupun program-program kegiatan tambahan yang menunjang pertumbuhan dan aspek perkembangan anak yang meliputi aspek perkembangan kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, nilai agama dan moral serta aspek perkembangan seni pada proses pembelajaran anak usia dini (Ligina, Suarta, & Nurhasanah, 2022). Selain itu, menurut data dari (Setiawan, et al., 2022) masih banyak sekali permasalahan yang menimpa anak-anak usia dini di Kota Bogor terutama dari segi kesehatan dasar, kesejahteraan dan perlindungannya. Permasalahan-permasalahan di Kota Bogor yang terus terjadi antara lain:

a) Stunting

Menurut *World Health Organization* (WHO), stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak-anak akibat adanya gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang kurang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2022, stunting di Kota Bogor mencapai persentase sebesar 5,33%.

b) Prevalensi Gizi

Prevalensi adalah jumlah keseluruhan penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di sebuah wilayah (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Dinas Kesehatan Kota Bogor pada tahun 2021, prevalensi gizi buruk pada balita di Kota Bogor sebesar 3,9% dan 5% anak dengan status gizi kurang. Berdasarkan berbagai kajian disebutkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya gizi buruk pada balita yakni karena faktor ekonomi, pengetahuan kesehatan tentang gizi yang kurang, tradisi pantangan yang dapat merugikan, serta adanya kesukaan yang berlebihan akan makanan tertentu.

c) Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Bogor mengalami penurunan, yang sebelumnya 53,15% pada tahun 2020 menjadi 44,02% pada tahun 2021. Persentase tersebut lebih kecil daripada target nasional sebesar 69,07%.

d) Penyandang Masalah Kesejahteraan

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kota Bogor pada tahun 2021 tercatat 178 anak yang tergolong dalam anak terlantar. Jumlah tersebut sangat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 105 anak. Selain itu, masih adanya korban kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Bogor dengan total korban kekerasan pada tingkat umur 0-5 tahun sebanyak 4 orang (UPTD PPA Kota Bogor 2022).

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin melihat sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Kota Bogor agar terpenuhinya kebutuhan esensial anak dan terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait serta terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yakni orang tua, keluarga, masyarakat, dan tentunya pemerintah daerah sebagai penyelenggara kebijakan PAUD HI yang terkandung pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 7 Ayat 1 dan 4. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang

## **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kota Bogor”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Angka partisipasi PAUD di Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Terkhusus di Provinsi Jawa Barat, presentase APK PAUD Kota Bogor adalah yang paling rendah
2. Masih banyak lembaga PAUD di Kota Bogor yang masih belum menerapkan PAUD HI secara komperhensif, terintegrasi, dan berkesinambungan
3. Permasalahan anak dalam segi kesehatan dasar, kesejahteraan dan perlindungan masih terjadi di Kota Bogor

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini dibatasi pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kota Bogor yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kota Bogor?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan penyelenggaraan kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kota Bogor.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **A. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk:

- 1) Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan penambah wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata
- 2) Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya

#### **B. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:

- Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan dalam memberikan sebuah evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif
- Bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat menjadi masukan yang positif bagi seluruhnya tentang pentingnya pendidikan anak usia dini
- Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik khususnya implementasi kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kota Bogor.